

IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Khairatul Isra¹ , Fitri Yulianis², Immu Puteri Sari³

UM Sumatera Barat, Padang, Indonesia ^{1,2,3}

Email: khairatulisra@gmail.com

Abstract

The abstract This study aims to examine the implementation of green accounting and its impact on the surrounding community, with a focus on PT Wilmar Nabati Indonesia located in Teluk Bayur, Padang. The adoption of green accounting is essential as industrial activities pose significant environmental risks that directly affect the quality of life of nearby residents. This research employs a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and documentation involving local community members and relevant company stakeholders. The findings reveal that the company has applied green accounting principles through waste management, environmental cost reporting, and corporate social responsibility (CSR) programs. However, the implementation remains suboptimal, as local residents continue to report environmental issues such as air and water pollution. Overall, the implementation of green accounting has contributed positively to increasing environmental awareness among both the company and the community, although greater transparency and community involvement in environmental decision-making are still needed. This research contributes to promoting more accountable and sustainable green accounting practices in the industrial sector.

Keywords: Green Accounting, Environmental Impact, Community, CSR, PT Wilmar Nabati Indonesia

Pendahuluan

Krisis lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan, seiring meningkatnya pencemaran air, udara, dan tanah yang bersumber dari limbah industri maupun sampah rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diberlakukan, implementasinya masih jauh dari optimal. Hal ini bertolak belakang dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya membawa dampak ekologis, tetapi juga memicu kerugian sosial dan ekonomi dalam skala besar. World Health Organization (2016) mencatat bahwa sekitar 23% dari total kematian global berkaitan dengan faktor lingkungan. Dampak lainnya mencakup penurunan nilai properti, terhambatnya sektor pariwisata, serta meningkatnya beban pengeluaran medis masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan, mengingat keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan sumber daya bersih.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih integratif dan preventif dari sektor industri. Salah satu solusi yang berkembang adalah green accounting atau akuntansi lingkungan. Konsep ini hadir sebagai respons atas keterbatasan sistem akuntansi konvensional yang belum mampu merefleksikan biaya eksternal atas degradasi lingkungan (Gray et al., 1996; Deegan, 2003). Green accounting mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan dampak lingkungan dari aktivitasnya melalui laporan keuangan, sehingga aspek ekonomi dan ekologi dapat terintegrasi secara lebih adil dan transparan.

Penerapan green accounting diharapkan menjadi bentuk konkret tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus strategi manajerial yang adaptif terhadap tekanan regulasi, masyarakat, dan pasar global yang semakin menuntut keberlanjutan. Di samping itu, penerapan ini juga berpotensi meminimalisasi dampak negatif industri terhadap masyarakat sekitar, terutama dalam hal kesehatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan hidup.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji implementasi green accounting dalam konteks industri di Indonesia, serta mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat dari dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan pendekatan ini, diharapkan terbuka ruang solusi yang lebih progresif dalam menjawab tantangan lingkungan masa kini dan mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi green accounting di PT Wilmar Nabati Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena sosial dan lingkungan berdasarkan perspektif informan, serta memungkinkan peneliti menangkap konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, yang merupakan wilayah yang berada di sekitar aktivitas operasional PT Wilmar Nabati Indonesia. Kegiatan penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari Mei hingga Juli 2025.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan perusahaan, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan arsip publik yang mendukung konteks penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi kepala kelurahan, ketua RT, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang memahami secara langsung permasalahan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan sekitar perusahaan untuk melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan, terutama terkait dengan pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Wawancara mendalam dilakukan secara semiterstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pendapat para informan terkait implementasi green accounting dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan alat bantu seperti perekam suara, buku catatan, dan kamera untuk mendokumentasikan data secara lengkap. Selain itu, dokumentasi berupa dokumen resmi, foto lapangan, dan data sekunder digunakan untuk memperkuat validitas data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif interaktif yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan merangkum data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan

pemahaman serta mengidentifikasi pola-pola penting. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai dampak implementasi green accounting terhadap masyarakat di sekitar PT Wilmar Nabati Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi *Green Accounting* menurut UUD Nomor 32 Tahun 2009

Implementasi Green Accounting di PT Wilmar Nabati Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya, serta berupaya untuk memenuhi kewajiban hukum dan sosialnya terhadap masyarakat sekitar.

- Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: PT Wilmar Nabati Indonesia berkomitmen untuk menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun terdapat penggusuran yang dialami masyarakat di sekitar Teluk Bayur, perusahaan berusaha untuk meminimalisir dampak negatif melalui pengelolaan limbah yang baik dan penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti instalasi Effluent Treatment Plant (ETP) dan scrubber.
- Kewajiban Menjaga dan Melestarikan Lingkungan: Perusahaan telah menjalankan tanggung jawabnya dalam pengelolaan limbah, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar Kelurahan Teluk Bayur dapat diminimalisir. Namun, polusi udara akibat aktivitas kendaraan di area tersebut masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.
- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): Proses AMDAL di PT Wilmar Nabati Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan identifikasi dan evaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh. Tanpa dokumen AMDAL yang disetujui, izin usaha tidak dapat diterbitkan, yang menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses ini.
- Penegakan Hukum: Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan diatur dengan tegas, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Hal ini bertujuan untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola dampak lingkungan.

- Partisipasi Masyarakat: Masyarakat di sekitar PT Wilmar Nabati Indonesia mengungkapkan pentingnya keterlibatan mereka dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Namun, terdapat kekurangan dalam upaya perusahaan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perusahaan diharuskan untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang merupakan tanggung jawab moral dan hukum. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Noor (2006) yang menyatakan bahwa eksplorasi sumber daya dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat.

Dalam konteks PT Wilmar Nabati Indonesia, penerapan Green Accounting menunjukkan konsistensi dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan. Meskipun perusahaan telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang signifikan, seperti pengelolaan limbah dan pemantauan kualitas lingkungan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal polusi udara dan keterlibatan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL dan pengelolaan lingkungan sangat penting untuk menciptakan transparansi dan mencegah konflik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, di mana masyarakat yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan akan merasa lebih dihargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dan tindakan perusahaan, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan konflik di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan upaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan lingkungan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Green Accounting di PT Wilmar Nabati Indonesia telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam hal keterlibatan masyarakat dan pengelolaan dampak lingkungan. Dengan memperkuat kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta keberlanjutan lingkungan yang lebih baik dan harmonis.

2. Implementasi Green Accounting sesuai PSAK 57 Revisi 2014

Implementasi Green Accounting sesuai dengan PSAK 57 Revisi 2014 di PT Wilmar Nabati Indonesia menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Hasil wawancara dengan pihak perusahaan dan masyarakat sekitar mengindikasikan bahwa perusahaan telah mengakui dan mencatat kewajiban lingkungan dan sosial sebagai bagian dari laporan keuangan mereka.

- Provisi untuk Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan: Perusahaan telah mengalokasikan dana untuk rehabilitasi dan reklamasi lahan, yang diakui sebagai provisi dalam laporan keuangan. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Provisi ini diestimasi berdasarkan biaya yang diperlukan untuk pemulihan lahan pasca-operasional, dan diharapkan dapat digunakan untuk kegiatan seperti penanaman kembali vegetasi dan pemulihan fungsi ekosistem.

Pada PT Wilmar Nabati Indonesia biaya pengembangan lingkungan berada pada Catatan Atas laporan Keuangan , yang termasuk kedalam bagian Beban Umum Administrasi yaitu:

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Beban Penjualan

Pajak Ekspor	xxx
Gaji	xxx
Operasi Penjualan	xxx
Penanganan	xxx
Survei Pproduk	xxx
Perbaikan dan Pemeliharaan	xxx
Listrik dan Air	xxx
Lain-Lain	xxx

Beban Umum Administrasi

Gaji	xxx
Beban Imbalan Kerja	xxx
Umum Kantor	xxx
Penyusutan	xxx
Perbaikan dan Pemeliharaan	xxx
Konsultasi	xxx
Pengembangan Lingkungan	xxx
Listrik dan Air	xxx
Hiburan	xxx

Keuangan xxx

Lain-lain xxx

Sumber: Laporan Keuangan PT. Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2024

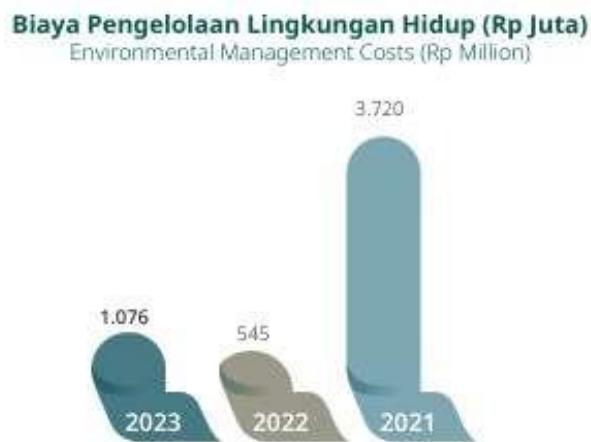
Pendekatan ini menunjukkan bahwa PT Wilmar Nabati Indonesia tidak hanya fokus pada aspek profitabilitas, tetapi juga memperhatikan triple bottom line, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, pencatatan biaya lingkungan bukan hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk nyata dari komitmen perusahaan terhadap prinsip green accounting dan pembangunan berkelanjutan.

- Liabilitas Hukum dan Lingkungan: PT Wilmar Nabati Indonesia mengakui liabilitas hukum dan lingkungan yang timbul dari kegiatan operasionalnya. Pengakuan ini mencakup kewajiban untuk menyisihkan dana untuk reklamasi dan rehabilitasi lingkungan, serta pengelolaan limbah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi standar akuntansi, tetapi juga berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab.
- Kewajiban Konstruktif Terkait Komitmen Sosial: Perusahaan juga memiliki kewajiban konstruktif yang timbul dari komitmen sosialnya terhadap masyarakat sekitar. Masyarakat mengharapkan perusahaan untuk terus melaksanakan program-program sosial yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial. Kewajiban ini diakui sebagai provisi dalam laporan keuangan jika memenuhi kriteria PSAK 57.
- Estimasi dan Ketidakpastian: Proses estimasi dan pengakuan provisi di PT Wilmar Nabati Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang ada. Perusahaan menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mencatat biaya-biaya lingkungan, serta mengungkapkan informasi terkait ketidakpastian dalam laporan keuangan dan sustainability report.

Menurut Harahap (2013), pengakuan kewajiban lingkungan sebagai bagian dari provisi mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip akuntansi yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan PSAK 57 oleh PT Wilmar Nabati Indonesia menunjukkan konsistensi dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pengakuan kewajiban lingkungan dalam laporan keuangan. Penelitian oleh Harahap (2013) dan lainnya menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor berbasis

sumber daya alam harus mengakui kewajiban lingkungan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan. Perusahaan telah mengeuarkan biaya untuk program pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp. 1.076 juta



Gambar 4.5

Biaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber: Sustainability Report PT Wilmar Cahaya Indonesia

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap perusahaan untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan. Hal ini mencerminkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Namun, terdapat juga tantangan yang dihadapi perusahaan, seperti ketidakpastian dalam estimasi biaya dan risiko hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan harus terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi reklamasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Wilmar Nabati Indonesia telah menerapkan prinsip Green Accounting dengan baik, namun masih perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pelaporan untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya akuntabilitas sosial dan lingkungan dalam praktik bisnis yang berkelanjutan.

3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur oleh PT Wilmar Nabati Indonesia di Kelurahan Teluk Bayur menunjukkan bahwa perusahaan berkontribusi dalam perbaikan jalan yang dilalui oleh kendaraan operasionalnya, namun kontribusi ini terbatas dan tidak mencakup pembangunan infrastruktur lainnya, seperti jembatan atau fasilitas umum yang lebih luas. Masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi perusahaan tidak merasakan dampak positif yang signifikan dari keberadaan perusahaan, dan kondisi jalan sebelum dan sesudah berdirinya perusahaan relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan berpartisipasi dalam infrastruktur, kontribusinya cenderung tidak merata dan lebih menguntungkan akses perusahaan itu sendiri.

Lebih lanjut, PT Wilmar Nabati Indonesia belum sepenuhnya terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Perusahaan hanya melakukan perbaikan jalan yang menjadi akses utama bagi operasionalnya, sementara masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi perusahaan tidak mendapatkan perhatian yang sama. Selain itu, terdapat isu terkait penggusuran rumah masyarakat setempat yang terjadi akibat pembangunan perusahaan, yang menambah kompleksitas hubungan antara perusahaan dan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, serta dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Dalam konteks ini, PT Wilmar Nabati Indonesia seharusnya tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur yang menguntungkan operasional perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Mankiw (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai modal publik yang terdiri dari berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, kontribusi PT Wilmar Nabati Indonesia terhadap infrastruktur di Kelurahan Teluk Bayur menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sosialnya. Meskipun perusahaan berpartisipasi dalam perbaikan jalan, kontribusi tersebut tidak mencakup pembangunan infrastruktur yang lebih luas yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Ketidakmerataan dalam kontribusi infrastruktur dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memicu konflik sosial dan mengurangi legitimasi perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, penting bagi PT Wilmar Nabati Indonesia untuk mengevaluasi kembali pendekatan mereka terhadap pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait infrastruktur dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa PT Wilmar Nabati Indonesia perlu memperluas kontribusinya terhadap pembangunan infrastruktur yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta keberlanjutan yang lebih baik dan harmonis di Kelurahan Teluk Bayur, serta memperkuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam PSAK 57, di mana pengakuan kewajiban terkait infrastruktur harus dilakukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lebih luas.

4. Sosial Ekonomi Masyarakat

Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh keberadaan PT Wilmar Nabati Indonesia di Kelurahan Teluk Bayur. Menunjukkan bahwa setelah berdirinya perusahaan, terjadi perubahan signifikan dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan dan petani kini mengalami penurunan peluang kerja, dengan banyak yang beralih ke sektor perdagangan. Namun, ketersediaan lapangan pekerjaan semakin menurun, dan akses masyarakat ke pantai ditutup oleh aktivitas perusahaan.

Meskipun terdapat beberapa sarana ekonomi baru, seperti rumah makan yang muncul sebagai dampak dari keberadaan perusahaan, masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi perusahaan tidak merasakan dampak positif yang signifikan. Mereka masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas seperti ATM, bank umum, dan toko elektronik. Sebagian besar masyarakat yang tinggal jauh dari perusahaan tetap menjalani profesi yang sama seperti sebelum perusahaan berdiri, menunjukkan bahwa dampak ekonomi perusahaan tidak merata.

Selain itu, PT Wilmar Nabati Indonesia rutin memberikan bantuan sosial kepada anak yatim dan janda pada hari-hari besar, seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Namun, bantuan ini menimbulkan kecemburuhan sosial di kalangan masyarakat, karena distribusinya dianggap tidak merata.

Keberadaan PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Teluk Bayur. Dalam perspektif akuntansi, PSAK 57 mengatur pengakuan provisi atas kewajiban yang timbul dari komitmen sosial perusahaan. Jika perusahaan secara konsisten memberikan kontribusi sosial, seperti pembangunan

fasilitas umum atau pelatihan ekonomi lokal, maka hal ini dapat menciptakan ekspektasi di masyarakat untuk terus mendapatkan dukungan. Namun, dalam kasus ini, kontribusi perusahaan tidak memenuhi harapan masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari setiap kegiatan usaha. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan oleh perusahaan seharusnya mencakup penilaian terhadap dampak sosial ekonomi, dan jika ditemukan potensi kerugian, perusahaan berkewajiban untuk melakukan upaya mitigasi. Namun, dalam praktiknya, dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti penutupan akses ke pantai dan penurunan lapangan pekerjaan, menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Perbandingan dengan penelitian Darwis (2015) menunjukkan bahwa di lokasi lain, keberadaan perusahaan kelapa sawit dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Namun, di Teluk Bayur, situasi justru berlawanan, di mana masyarakat mengalami penurunan ekonomi dan akses terhadap sarana ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa dampak perusahaan sangat bergantung pada konteks lokal dan cara perusahaan berinteraksi dengan masyarakat.

Kecemburuan sosial yang muncul akibat distribusi bantuan yang tidak merata juga mencerminkan perlunya perusahaan untuk mengembangkan strategi CSR yang lebih inklusif dan transparan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program sosial, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa PT Wilmar Nabati Indonesia perlu memperhatikan dampak sosial ekonomi dari operasionalnya dan berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi sosialnya. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan inklusif, perusahaan tidak hanya akan memenuhi tanggung jawab sosialnya, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Teluk Bayur.

5. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas PT Wilmar Nabati Indonesia, khususnya dalam proses operasional Crushing Plant. Menunjukkan bahwa terdapat beberapa dampak negatif yang signifikan, antara lain:

- Pencemaran Udara: Aktivitas mesin penghancur dan proses pengeringan kernel menghasilkan debu dan emisi yang dapat mencemari udara di sekitar area operasional.
- Kebisingan: Suara bising yang dihasilkan oleh mesin crusher dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar dan pekerja.
- Limbah Padat dan Cair: Sisa proses pemisahan minyak, seperti cangkang dan serat, serta air limbah, berpotensi mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan baik.
- Penggunaan Energi Tinggi: Proses pengeringan dan pengepresan memerlukan energi yang besar, yang umumnya berasal dari bahan bakar fosil, sehingga berkontribusi pada emisi gas rumah kaca.
- Potensi Kebakaran: Bahan baku yang digunakan, seperti kernel kering, memiliki risiko tinggi terbakar, terutama jika limbah serat atau cangkang tidak ditangani dengan benar.

Pada awal berdirinya perusahaan, terjadi pencemaran yang menyebabkan keruhnya warna air sungai menuju pantai dan menimbulkan bau tidak sedap. Namun, perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan membuat parit yang mengarahkan limbah ke kolam pengolahan di dalam area perusahaan. Saat ini, tidak ada lagi keluhan dari warga mengenai pencemaran limbah, dan seluruh responden menyatakan bahwa limbah perusahaan tidak mencemari lingkungan.

Wilmar Group menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui kebijakan lingkungan dan pelaporan rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup setempat. Perusahaan juga melakukan pemantauan kualitas air laut di sekitar area operasional dan berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan pantai, sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem pesisir.

Dalam konteks ini, PT Wilmar Nabati Indonesia memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memulihkan dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya. Pengelolaan dampak lingkungan tidak hanya merupakan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai alat untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha. Dalam hal ini, PT Wilmar Nabati Indonesia telah memenuhi kewajiban tersebut dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan dampak lingkungan secara proaktif. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun perusahaan telah berhasil mengelola limbah dengan baik,

tantangan tetap ada, terutama dalam hal pencemaran udara dan kebisingan yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Pendekatan perusahaan dalam mengidentifikasi biaya lingkungan melalui analisis cermat terhadap aktivitas operasional mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Biaya-biaya ini dicatat sebagai bagian dari pos biaya lingkungan dalam laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PT Wilmar Nabati Indonesia telah mengambil langkah-langkah positif dalam mengelola dampak lingkungan, namun perlu terus meningkatkan upaya mitigasi dan pencegahan untuk memastikan bahwa aktivitas industri tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan meningkatkan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta keberlanjutan yang lebih baik dan harmonis di wilayah operasional perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Implementasi Green Accounting dan Dampaknya Terhadap Masyarakat" di PT Wilmar Nabati Indonesia, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- Penerapan Green Accounting:** PT Wilmar Nabati Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip green accounting dengan baik. Pengelolaan limbah dilakukan secara efektif melalui penggunaan Effluent Treatment Plant untuk limbah cair dan scrubber untuk emisi dari boiler. Selain itu, perusahaan melakukan pemantauan berkala terhadap kualitas udara dan kebisingan, serta mengelola limbah B3 dan non-B3. Biaya terkait pengelolaan lingkungan dicatat dalam laporan keuangan dan dirinci dalam sustainability report, yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi. Meskipun demikian, polusi udara akibat debu dari kendaraan perusahaan masih menjadi masalah yang perlu diatasi.
- Kebijakan Lingkungan:** PT Wilmar Nabati Indonesia berpegang pada Kebijakan Lingkungan Wilmar Group yang berorientasi jangka panjang, menekankan keseimbangan antara operasional industri dan pelestarian lingkungan. Perusahaan secara rutin melaporkan hasil pemantauan lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mencakup aspek-aspek penting seperti kualitas udara, air limbah, emisi, dan pengelolaan limbah. Pelaporan ini mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial.

3. **Bantuan Sosial:** Perusahaan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, khususnya anak yatim dan janda, pada perayaan hari-hari besar seperti Idul Fitri. Ini menunjukkan upaya perusahaan dalam berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sekitar.
4. **Dampak Terhadap Infrastruktur:** PT Wilmar Nabati Indonesia tidak berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Kelurahan Teluk Bayur. Masyarakat setempat melaporkan tidak adanya perubahan infrastruktur yang berarti sejak berdirinya perusahaan. Keberadaan banyak perusahaan besar di kawasan tersebut menciptakan kondisi lingkungan yang kompleks, di mana masyarakat merasa dampak negatif yang mereka alami merupakan akumulasi dari berbagai aktivitas industri, bukan hanya dari satu perusahaan. Ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pelaporan dan akses informasi yang terbatas menjadi penghambat dalam menyampaikan keluhan secara resmi.
5. **Pembangunan Berkelanjutan dan Penggusuran:** Meskipun PT Wilmar Nabati Indonesia menunjukkan antusiasme terhadap pembangunan berkelanjutan, hal ini menimbulkan ancaman bagi masyarakat sekitar terkait penggusuran. Kasus penggusuran pada tahun 2017 yang memaksa masyarakat pindah tanpa kejelasan mengenai proyek pembangunan yang dijanjikan menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan transparansi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas perusahaan. Selain itu, peran aktif pemerintah dan lembaga pengawas lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa keluhan masyarakat dapat disalurkan dengan tepat dan perusahaan dapat bertanggung jawab secara proporsional.

Referensi

- Almunawwaroh, Medina et. Al, (2022), "**Green Accounting: Akuntansi dan Lingkungan**". Bandung: Media SAINS Indonesia.
- Aniela, (2012),"**Peran Akuntansi Lingkungan dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan**". Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.
- Arifin, Z. (2009). **An Analysis Of Accounting Terms Translation In Textbook Management Accounting** By Don R. Hansen and Maryane M. Mowen Into **Akuntansi Manajamen** By Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary. Kajian Linguistik dan Sastra, 21(2), 155-168.
- Astuti, Tri Yuni, (2020), "**Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Tahun 2016-2018)**". Skripsi. Klaten, Universitas Widya Dharma.
- Cohen, N, P, Robbins. (2011). "**Green Business: An A-to-Z Guide. Thousand Oaks**", CA: Sage Publications Inc.
- Damayanti Riska Septi, Yanti Harti Budi, (2023), "**Pengaruh Implementasi Green Accounting Dan Material Flow Cost Accounting Terhadap Sustainable Development**".
- Dewi, P, Edward Narayana, I. P. (2020). "**Implementasi Green Accounting, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan**". E-Jurnal Akuntansi.
- Erlangga, C. M., Fauzi, A., & Sumiati, A. (2021). "**Penerapan green accounting dan corporate social responsibility disclosure terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. Akuntabilita**"s, 14(1), 61-78.
- Fakoya, M. (2014). "**An Adjusted Material Flow Cost Accounting Framework for Process Waste-Reduction Decisions in the South African**". March.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). "**Managerial accounting**". South-Western.
- Hartono, E. (2018). "**Implemetasi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia**". Jurnal Kajian Akuntansi, 2(1), 108-122.
- Herlina, N. (2017). "**Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia**". Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.

- Kemala, A. (2013). **"Pemahaman Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan PSAK pada Akuntan Publik"**. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 13(1), 59-78.
- Lestari, S. E. (2019). **"Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup"**. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48, No. 2, 147–168.
- Loen, M. (2018), **"Penerapan Green Accounting Dan Material Flow Cost Accounting (Mfca) Terhadap Sustainable Development"**. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadipayana.
- Marota, R. (2017). **"Green Concepts and Material Flow Cost Accounting Application for Company Sustainability"**. Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship.
- Mina, R. (2016). **"Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup"**. Arena Hukum, 9(2), 149–165.
- Mulasari, Utami, (2012),**"Kandungan Peroksida Pada Minyak Goreng di Pedagang Makanan Gorengan Sepanjang Jalan Prof. Dr. Soepomo Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2012"** Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
- Neni, A. (2012) "Mengenal GreenAccounting," Permana, 4 (1), hal. 69–75.
- Ningsih, W. F., & Rachmawati, R. (2017). **"Implementasi Green Accounting dalam meningkatkan kinerja Perusahaan"**. JABE (Journal of Applied Business and Economic), 4(2), 149-158.
- Nugroho, G. T. (2015). **"Pengaruh profitabilitas, struktur kepemilikan, kebijakan dividen dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)"**.
- Nurafika, P., & Sari, E. N. (2019). **"Analisis Penerapan Green Accounting di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para"**. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK), 2(1), 69-80.
- Prastowo, Andi, (2012, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian".
- Puspita, Dyah Ayu dan Arya Surendra, (2019), **"Analisis Penerapan Green Accounting (Studi Empiris Pada UKM Pengrajin Kayu U.D Mega Cipta di Desa Plangsari, Banaran, Kalijambe, Kabupaten Sragen)"**. Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, Vol. 17 No. 3: 5-11.

- Putra, A. (2018). **"Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan"**. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(2), 69-79.
- Putri P, Suhartini, Aning Widoretno, (2021), **"Implementasi Green Accounting Berbasis University Social Responsibility (Usr)"**. Economic, Business, Management, and Accounting Journal.
- Rahmawati, I., Rikumahu, B., & Dillak, V. J. (2017). **"Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan"**. JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi), 2(2), 54-70.
- Ratulangi, Aldy V. (2018), **"Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Biaya Operasional Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado"**. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Rudianto, Y., Rengkung, L. R., & Maweikere, A. J. M. (2023). **"Analisis Nilai Tambah Kelapa Sawit Menjadi Crude Palm Oil (CPO) di PT. Surya Raya Lestari 1 Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat"**. Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan), 5(3), 20-25.
- Sari, W. P. P. (2014). **"Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Pembantu Mayjen Sungkono Surabaya (Doctoral Dissertation, Stie Perbanas Surabaya)"**.
- Selpiyanti, Zaki F, (2020), **"Pengaruh Implementasi Green Accounting dan Material Flow Cost Accounting Terhadap Sustainable Development"**. Jurnal Aset (Akuntansi Riset).
- Sofia Liza B, (2023), **"Implementasi Green Accounting Dalam annual Report Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei)"**. Skripsi Akuntansi Terapan.
- Sugiyono, (2010). **"Statistika Untuk Penelitian"**. Bandung: Alfabeta.
- _____(2017), **"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D"**. Bandung: Alfabeta.
- _____(2018). **Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung:Penerbit Alfabeta.
- _____(2020). **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung:Penerbit Alfabeta.
- _____(2020). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung:Alfabeta.

Sulistiwati, E., & Dirgantari, N. (2016). **“Analisis Green Accounting Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan.

Susanto, Y. G. (2024). **“Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Green Banking Pada Perusahaan Perbankan Indonesia”**. (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Duta Wacana).

Sutanto (2018), **“Green Accounting dan Partisipasi Komunitas”**. Dalam artikel ilmiah akuntansi.

Widya G, (2020), **“Pengaruh Implementasi Green Accounting Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

Wijaya, M., & Siregar, Y. (2016). **“Pengaruh Insentif dan Jaminan Kesehatan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)”**. Unit Usaha Adolina Perbaungan Serdang Bedagai.

Zulhaimi, H. (2015). **“Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Perusahaan”**. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, UPI.

Badan Pusat Statistik Indonesia, (2018), **“Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018”**.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2019/11/22>.

Badan Pusat Statistik Tahun 2019, **“Tentang Kelapa Sawit Indonesia”**.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2020/11/30>.

Badan Pusat Statistik Tahun 2023, **“Tentang Kelapa Sawit Indonesia”**.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29>.

Kementerian Pertanian Indonesia Tahun 2023, **“Tentang Kelapa Sawit”**.
<https://ditjenbun.pertanian.go.id>.

KEP-134/BL/2006, **“Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emitem atau Perusahaan Publik”**.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, **“Tentang Penilaian Aktifitas Bagi Bank Umum”**.

PSAK, Nomor 32, **“Akuntansi Kehutanan”**. <http://www.iaiglobal.or.id>.

_____, Nomor 33, **“Akuntansi Pertambangan Umum”**.

_____, Nomor 57, **“Standar Akuntansi Yang Mengatur Pengakuan, Pengukuran, Dan Pengungkapan Provisi, Kewajiban Kontijensi, Dan Aset Kontijensi”**.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, "**Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**".

_____, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, "**Tentang Perseroan Terbatas**".

Rochmani. (2015). "**Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi**". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44 (1), 18–25.

RSPO, (2023), "**Siklus Tinjauan Lima Tahunan**". <https://rspo.org/id/rspo-standards-review-2023>.